



## **Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Ponorogo**

**Putri Rahayu<sup>1\*</sup>, Hanik Fitriani<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, [PutriRahayu21102000@gmail.com](mailto:PutriRahayu21102000@gmail.com)

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, [Hanikfitriani9@gmail.com](mailto:Hanikfitriani9@gmail.com)

---

### **Article Info**

---

#### **Article history:**

Received May 15, 2023

Revised June 25, 2023

Accepted June 26, 2023

Available online June 30, 2023

\*Corresponding author email:  
[PutriRahayu21102000@gmail.com](mailto:PutriRahayu21102000@gmail.com)

---

#### **Keywords:**

Effectiveness, Non-Cash Food Assistance, Poverty Alleviation

---

### **Abstract**

Poverty is the inability of individuals to meet their needs economically. One of the programs for poverty alleviation is Non-Cash Food Assistance (BPNT). The problems in the field are still many recipients of Non-Cash Food Assistance that need to be corrected. The primary purpose of this study is to analyze the realization of the BNPT program in poverty alleviation in Ponorogo district, to analyze the obstacles encountered by the BPNT program in the Ponorogo Regency area in poverty alleviation, and to analyze the effectiveness of the BPNT program in poverty alleviation in Ponorogo district. This research uses qualitative methods. The findings of this study are 1) Realization of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Ponorogo district, namely to reduce the expenditure burden through meeting food needs. BPNT distribution involves Warung Agents taking food ingredients such as vegetables, eggs, etc. 2) Constraints of the BPNT program in poverty alleviation in Ponorogo district: inappropriate personal data resulted in the Prosperous Family Card not being issued. 3) The effectiveness of the BPNT program in poverty alleviation in Ponorogo district includes: Target accuracy needs to be more effective, Program socialization has not been effective, Program objectives have been effective, Program monitoring has not been effective because monitoring from the assistance is still ineffective.

---

DOI: [10.21154/niqosiya.v3i1.1758](https://doi.org/10.21154/niqosiya.v3i1.1758)

Page: 146-155

---

Niqosiya with CC BY license. Copyright © 2023 Putri Rahayu, Hanik Fitriani

## PENDAHULUAN

Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi yang dialami oleh negara-negara berkembang, bahkan negara-negara maju. Kemiskinan yang sedang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh berbagai faktor hal yang saling berkaitan erat satu sama lain (Baihaqi, 2022). Dalam dimensi ekonomi, kemiskinan sangat mudah dilihat dan menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, sandang, perumahan dan kesehatan. Kemiskinan secara ekonomi kualitatif dapat dilihat dari kondisi perumahan yang kumuh dengan perabotan dengan seadanya, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan kesehatan yang rendah. Menurut Robert Chamber sebagai inti dari masalah kemiskinan. Menurutnya perangkap kemiskinan itu terdiri dari lima unsur yaitu kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, kadar sosial, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Pada kelima unsur ini sering kali saling berkait satu dengan yang lain sehingga berbahaya dan mematikan peluang hidup orang atau keluarga miskin (Mujahiddin, 2017). Dalam dimensi ekonomi, kemiskinan sangat mudah dilihat dan menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, sandang, perumahan dan kesehatan. Kemiskinan secara ekonomi kualitatif dapat dilihat dari kondisi perumahan yang kumuh dengan perabotan dengan seadanya, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan kesehatan yang rendah (Imron, 2003). Sedangkan dilihat secara kuantitatif keadaan hidup manusia sera kekurangan, atau dengan bahasa yang tidak lazim “tidak berharta benda”.

Kebijakan kemiskinan merupakan suatu usaha dalam pengambilan keputusan hal kemiskinan mulai dari menentukan target dengan menggunakan indikator, penanganan dan penanggulangan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan dalam peraturan presiden No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan menyebutkan bahwa kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat (Noor dan Kholif n.d.). Dalam peranan Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo menjalankan pembangunan daerah yang telah diamanatkan oleh pemerintah daerah pusat berupa peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di tingkatan di dalam kota saja tetapi di perhatikan lagi untuk keseluruhan wilayah kota Ponorogo sampai ke desa. Upaya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, maka melakukan berbagai program-program pemerintah. Program pemerintah untuk kemampuan melakukan sesuatu dan pengentasan masyarakat miskin yang telah dilakukan sejak akhir tahun 60-an (Yuliana, 2020).

Ketika suatu program berjalan dengan baik, maka suatu organisasi tersebut telah menjalankan organisasi yang efektif (Sopha, 2010). Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil senantiasa yang berkaitan dengan efisien. Untuk meningkatkan efektivitas, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia pada rapat Kabinet Terbatas memberikan panduan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai. Hal ini sesuai peraturan Indonesia No. 82 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa strategi pengelolaan keuangan dan keterhubungan masyarakat

dengan perbankan merupakan upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan (Benny dan Agustina, 2018). Dalam penelitian sebelumnya membahas sejauh mana efektivitas program dalam upaya pengentasan kemiskinan kemudian membahas faktor penghambat efektivitas dalam pelaksanaan program keluarga harapan dan membahas solusi pemecahan permasalahan pada pelaksanaan Banyaknya penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan menjadikan pemerintah berupaya keras dalam program pemberantasan kemiskinan yang melalui penyaluran bantuan dana dari pemerintah pusat dan daerah. Namun, program ini tidak berjalan semestinya dan tidak tepat sasaran. Hal ini menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia (Aldzuhri, 2021).

Dalam peranan Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo menjalankan pembangunan daerah yang telah diamanatkan oleh pemerintah daerah pusat berupa peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di tingkatan di dalam kota saja tetapi di perhatikan lagi untuk keseluruhan wilayah kota Ponorogo sampai ke desa. Upaya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, maka melakukan berbagai program-program pemerintah. Program pemerintah untuk kemampuan melakukan sesuatu dan pengentasan masyarakat miskin yang telah dilakukan sejak akhir tahun 60-an (Yuliana, 2020). Perlu digarisbawahi bahwa ketika angka kemiskinan menurun tidak berarti bahwa kondisi ekonomi selalu meningkat. Tujuan dari pemulihan ekonomi nasional adalah untuk mengoptimalkan angka kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini dapat diukur melalui tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan penyebaran pendapat (Lincoln, 2020).

Perkembangan jumlah penduduk miskin di kabupaten Ponorogo setiap tahunnya tidak stabil terkadang mengalami peningkatan bahkan juga mengalami penurunan seperti berita dari BPS Ponorogo yang menyatakan bahwa pada garis kemiskinan di Ponorogo mengalami penurunan sebesar 9,05 persen (Statistik, 2021). Namun dengan masih adanya RTS (Rumah Tangga Sasaran) maka dapat ditentukan program-program pemerintah untuk penduduk miskin. RTS didapat dari hasil sensus BPS sedangkan jumlah penduduk miskin didapat dari survey sosial ekonomi nasional untuk evaluasi program pemerintah di bidang pengentasan kemiskinan. Dari data RTS yang diperoleh akan digunakan untuk program bantuan sosial, diantaranya yaitu adanya bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sehat (KKS), Sembako (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) (Ishak, Fadlurrohim, dan Nulhaqim, 2019).

Dalam hal ini program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang dibagikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui prosedur akun elektronik yang dimanfaatkan hanya untuk membelanjakan keperluan sandang pangan di pedagang pangan/ *e-warong* yang bekerjasama dengan bank (Ishak, Fadlurrohim, dan Nulhaqim, 2019). Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupateen Ponorogo, banyak mendapatkan respon yang positif dan negatif dari masyarakat. Adapun respon positif dari masyarakat yaitu mereka sangat terbantu dengan adanya program bantuan ini, dengan adanya program bantuan ini beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka sedikit berkurang.

Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai kepada masyarakat Kabupaten Ponorogo merupakan hal yang dibutuhkan masyarakat kurang mampu. Dengan disalurkan bantuan ini dari pemerintah ke masyarakat, diharapkan masyarakat mampu mempertahankan keadaan ekonomi keluarga dan dapat dimanfaatkan secara efektif. Selain itu, dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan tepat sasaran dalam penyalurannya.

Setelah pengamatan di lapangan, peneliti tertarik untuk mengamati lebih dalam lagi tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengingat angka kemiskinan yang cukup tinggi dengan program bantuan tersebut dapat meringankan dampak kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Ponorogo. Namun permasalahan yang terjadi di lapangan masih banyak penerima bantuan pangan non tunai yang belum tepat (tepat sasaran penerima manfaat, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat kualitas). Sehingga berdasarkan data angka kemiskinan tentu menjadi salah satu perhatian karena dapat menimbulkan ketidakefektifan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini (Budiani, 2017).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian yang dilaksanakan di suatu lapangan atau tempat lain yang ditunjukkan sebagai tempat untuk melakukan penelitian guna mengidentifikasi peristiwa-peristiwa tertentu yang sedang terjadi di lokasi tersebut (Fathoni, 2006). Penelitian dilaksanakan secara langsung pada penerima BPNT di Wilayah Kabupaten Ponorogo.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. data primer yaitu berdasarkan informasi dari pelaku informasi dari pelaku-pelaku utama dan juga arahan terjun secara langsung di lapangan yaitu dalam penelitian Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Ponorogo. Data sekunder berupa buku, hasil penelitian (jurnal, artikel, dan skripsi). Selain didukung dari adanya data primer juga adanya dari data sekunder yaitu melihat obyek orang lain di dalam penelitian ini. Dalam pengumpulan data utama yang digunakan berasal dari hasil wawancara dilakukan kepada masyarakat penerima program BPNT, Pendamping BPNT, Agen Warung BPNT.

Setelah data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data dengan *Editing, Organizing*, dan Analisis data. Analisis data merupakan proses pengumpulan data, reduksi data. Untuk Teknik keabsahan data menggunakan uji kredibilitas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Realisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo**

Penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah upaya pemerintah mentransformasi bentuk bantuan menjadi non tunai melalui penggunaan kartu elektronik yang selanjutnya disebut dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program tersebut bertujuan untuk

mengurangi beban pengeluaran melalui pemenuhan kebutuhan pangan bagi keluarga miskin, tidak mampu atau rentan terhadap resiko (Sembako, 2020).

Program BPNT merupakan hasil transformasi dari program pemerintah sebelumnya yaitu Program Beras Sejahtera (Rastra) kemudian pada tahun 2018 program BPNT hadir sebagai memperbaiki program sebelumnya. Berbagai perubahan yang terjadi mulai masuk awal saldo sebesar Rp.110.000. Masyarakat kabupaten Ponorogo dengan pencaharian yang mayoritas sebagai petani, buruh tani, kuli bangunan, tukang bengkel, dan lain sebagainya. Warga dengan kondisi ekonomi prasejahtera yang pendapatannya di bawah rata-rata masih cukup.

Berdasarkan teori dadang solihin mengatakan upaya dalam pengentasan kemiskinan harus terus menerus dilakukan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan.

#### 1. Kebijakan Program

Kebijakan program pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan merupakan yang mendasar dan strategi sebagai daerah (Solihin, 2021). Berdasarkan hasil temuan penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di kabupaten Ponorogo dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program BPNT disalurkan melalui pendamping yang ditunjuk setiap kecamatan untuk bertanggung jawab. Penyaluran BPNT melibatkan Agen Warung. Adapun bahan pangan untuk program BPNT adalah sumber karbohidrat (beras, atau bahan pangan lokal), sumber protein hewani (telur, daging, ayam, ikan) dan lain sebagai yang bermanfaat untuk tubuh. Dalam kualitas pihak yang terlibat benar-benar mengecek sesuai takaran dan aturan dari pemerintah. Selama proses penyaluran program BPNT disalurkan kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria atau yang paling membutuhkan. Peserta anggota BPNT di persyaratkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercantum sebagai data PPKS atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu.

#### 2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan teori Dadang Solihin mengatakan sumber daya manusia dalam pengentasan kemiskinan menjadi bagian penting dan sangat menentukan. Untuk menentukan masyarakat miskin pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari pihak desa. Di kabupaten Ponorogo dilaksanakan dengan monitoring, evaluasi, sosialisasi dan edukasi. Ketika KPM datang ke kantor desa masing-masing lalu menanyakan permasalahannya lalu langsung evaluasi kemudian sosialisasi yang dijelaskan kembali bagaimana menangani masalahnya dan kemudian di edukasi di berikan arahan apa yang harus dilakukan. Adanya monitoring pada program BPNT di kabupaten Ponorogo untuk mempersiapkan sasaran mana yang harus di datangi, siapa saja yang akan terlibat, kemudian mengumpulkan data yang nanti untuk di analisis yang nantinya di laporkan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.

#### 3. Pendataan

Pendataan tentang akurasi data tentang kemiskinan menjadi bagian yang sangat

penting terkait dengan pilihan program yang harus diputuskan untuk di implementasikan yang tentunya disesuaikan dengan kondisi situasi yang ada. pendataan penerima KPM di wilayah Kabupaten Ponorogo masih didasarkan pada data lama yang tidak sering diperbarui sehingga seringkali ditemukan laporan dari masyarakat mengenai mengapa dirinya tidak terdata sebagai penerima program BPNT sedangkan terdapat masyarakat yang di golongan tidak layak mendapatkan program BPNT justru mendapatkannya. Sehingga dengan tidak tercatatnya pendataan yang akurat dapat menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan wilayah kabupaten Ponorogo.

### **Kendala Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Ponorogo**

Menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam bukunya kamus lengkap bahasa Indonesia, kendala adalah, menghambat, sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran, rintangan, halangan. Setiap pendamping per kecamatan di kabupaten Ponorogo membahas kendala yang terjadi seperti kesulitan pendamping untuk kelapangan, kendala KPM yang sudah tidak layak dapat mendapatkan bantuan dan juga mengenai kerjasama komunikasi antara pendamping dengan *e-warong*. Dalam hal ini pendamping kurang komunikasi dalam menangani dalam permasalahan yang dihadapi.

Rapat yang selalu diadakan setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, bertempat di kantor kecamatan masing-masing, rapatnya ini para pemilik *E-warong* dan pendamping sebagai koordinator rapat, pembahasannya itu seperti kendala dan juga solusi tepat dalam menanganinya serta penilaian terhadap *e-warong*, kendala yang dibahas yaitu saat pencairan bantuan, KPM yang bantuannya di hentikan, dan bahan makanan yang mencakup kualitas dan harga yang dijual ke KPM, dan kendala jika ada oknum yang mencurigakan

Berdasarkan hasil temuan peneliti mengenai ketepatan sasaran adanya kendala yaitu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah Ponorogo belum tepat sasaran, karena berdasarkan hasil wawancara KPM disana hampir keseluruhan KPM digolongkan keluarga mampu, sehingga sudah tidak berhak lagi menerima bantuan BPNT. Dan memang pada saat turun riset, penerima program BPNT ini tidak diperbarui kembali penerimanya masih memakai data yang lama.

Kemudian kendala mengenai pemantau program yaitu dana pada Kartu Keluarga (KKS) kosong, ternyata setelah dilakukan pengecekan data diri tidak sesuai selain itu KPM yang sulit untuk dihubungi pada saat penyaluran program sehingga menghambat proses penyaluran.

### **Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Ponorogo**

Terdapat sejumlah permasalahan utama yang dihadapi di Indonesia pada saat ini, salah satunya permasalahan tentang kemiskinan. Dalam hal ini pemerintah Indonesia belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut, melainkan hanya dikurangi jumlah dan di minimalkan derita masyarakat miskin. Peran pemerintah dalam mengurangi

jumlah dan meminimalisir kemiskinan salah satunya menjangkau program kesejahteraan rakyat, melalui pemberian bantuan sosial pada masyarakat. Berdasarkan teori menurut H. Emerson yang diungkapkan oleh Soewarno Handayani S. Yakni efektivitas merupakan pelaksanaan ukuran pencapaian tujuan tertentu. Indikator yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengukur efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo (Soewarno, 2016).

#### 1. Ketepatan Sasaran Program

Sasaran dari program ini adalah masyarakat yang termasuk dalam kriteria program tersebut, di antaranya keluarga berpendapatan rendah yang tidak berpenghasilan tetap, tetapi memiliki pekerjaan yang tidak mencukupi kebutuhannya. Di mana ketidaktepatan sasaran tersebut terdapat keluarga yang kurang mampu tetapi tidak mendapatkan bantuan, dan ada keluarga yang dikatakan sudah mampu masih mendapatkan program bantuan tersebut. Di wilayah kabupaten Ponorogo penerima bantuan BPNT kebanyakan keadaan perekonomian baik di mana mereka sebagian besar mempunyai lahan pertanian. Meskipun mereka tidak menikmati setiap hari tetapi masih bisa memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan hasil panen raya untuk beberapa bulan kedepan. Masih banyak ditemukannya masyarakat miskin yang belum merasakan manfaat dari program yang disalurkan, mereka adalah pendatang yang perekonomiannya rendah tetapi tidak terdata dalam program tersebut, terdapat keluarga yang memang benar-benar sudah dikatakan mampu tetapi mereka masih tetap mendapatkan bantuan ini dikarenakan data yang digunakan masih mengacu pada data penerima bantuan yang lama, belum ada pendataan lagi.

Dengan demikian ketepatan sasaran pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah kabupaten Ponorogo masih belum efektif, belum ada pembaharuan data. Dalam menetapkan sasaran dari program sebaiknya benar-benar dilakukan secara tepat, padahal masih banyak keluarga yang belum merasakan manfaat dari program tersebut. Pada penerima BPNT di Kabupaten Ponorogo kebanyakan tidak termasuk kriteria program.

#### 2. Sosialisasi Program

Efektivitas sosialisasi program kesanggupan penyelenggaraan program pada pelaksanaan sosialisasi program mengenai program bisa tersampaikan ke masyarakat pada umumnya serta sasaran peserta program pada khususnya. Dinas Sosial membagikan sosialisasi pada penerima bantuan ketika mendapatkan Kartu Penerima Manfaat dan menyampaikan kepada Kecamatan dan Kelurahan untuk mengedukasi masyarakat mengenai bantuan ini. Di mana ada beberapa dari mereka yang tidak bisa mengikuti sosialisasi program dikarenakan hal mendesak yang tidak bisa ditinggalkan pada waktu dilakukannya sosialisasi. Dari data yang ditemukan terkait sosialisasi program Bantuan Pangan Non Tunai di wilayah Kabupaten Ponorogo menunjukkan sosialisasi sudah dilaksanakan dengan memberikan pemahaman terutama kepada KPM tentang program, sehingga KPM tidak salah paham mengenai pemberian bantuan dan tidak salah dalam menggunakannya.

Dengan demikian sosialisasi program Bantuan Pangan Non Tunai kepada wilayah Kabupaten Ponorogo sudah dilaksanakan namun, belum efektif pada seluruh masyarakat penerima KPM BPNT, seperti dengan persyaratan salah satu tidak teridentifikasi, aturan dan nominal yang berhak beliau dapatkan. Masyarakat penerima BPNT masih belum paham akan manfaat bantuan tersebut, maka dari itu kurangnya edukasi tentang sosialisasi.

### 3. Tujuan Program

Tujuan program dikatakan efektif maka dibutuhkan tahapan-tahapan, baik tahapan pencapaian maupun tahapan prioritasnya. tujuan program BPNT telah berjalan sebagaimana mestinya, di mana dari data yang diperoleh masyarakat penerima bantuan merasa terbantu dengan adanya program tersebut walaupun masih ditemukannya ketidaktepatan sasaran penerima program ini. Selain itu masyarakat penerima BPNT dapat mengurangi beban pengeluaran dalam pemenuhan. Tetapi ketidak tepatan waktu masih sering terjadi keterlambatan. Dengan demikian tujuan program di Kabupaten Ponorogo telah efektif dan di dimanfaatkan untuk kebutuhan gizi pada tubuh, hal ini dapat mengurangi beban pengeluaran KPM melalui program bantuan tersebut.

### 4. Pemantauan Program

Pemantauan program dikatakan efektif jika kegiatan mengamati pelaksanaan program dan proyek, dalam waktu yang sedang berjalan, serta mencoba memperbaiki kesalahan agar pada akhir penyelesaian. Pemantauan program bahwasannya pemantauan dilaksanakan di wilayah kabupaten Ponorogo pada saat proses penyaluran bantuan kepada KPM. Penyaluran bantuan dilaksanakan 2 kali ada yang 1 kali saja, tergantung banyaknya KPM di daerah masing-masing. Saat pencairan masih ada yang belum cair di hari itu maka masyarakat mengeluhkan kepada pihak pencairan di *e-warong* saja. Pendamping melayani masyarakat miskin saat pencairan di *e-warong*. Tetapi tidak semua pendamping memantau dari proses awal sampai pencairan.

Dengan demikian pemantauan program bantuan di wilayah Kabupaten Ponorogo belum efektif, sebab dalam pemantauan program BPNT masih kurang efektif. Para pendamping tidak selalu hadir dalam pencairan, pemantau tidak hanya dilihat dalam pencairan tetapi dari realisasi dana, ketersediaan pangan di *e-warong*.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai Penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan upaya pemerintah mentransformasi bentuk bantuan menjadi non tunai melalui penggunaan kartu elektronik yang selanjutnya disebut dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program tersebut bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran melalui pemenuhan kebutuhan pangan bagi keluarga miskin, tidak mampu atau rentan terhadap resiko. Program Bantuan Pangan Non Tunai membantu dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin dengan tujuan jangka Panjang di harapkan dengan adanya bansos ini akan memutuskan rantai kemiskinan. Program ini merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam percepatan penanggulangan

masalah kemiskinan di Indonesia. Program BPNT merupakan hasil transformasi dari Program pemerintah sebelumnya yaitu Program Beras Sejahtera (Rastra) kemudian pada tahun 2018 program BPNT hadir sebagai memperbaiki program sebelumnya. Berbagai perubahan yang terjadi mulai masuk awal saldo sebesar Rp.110.000. Kendala yaitu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam pengentasan kemiskinan di wilayah Ponorogo belum tepat sasaran, karena berdasarkan hasil wawancara KPM disana hampir keseluruhan KPM digolongkan keluarga mampu, sehingga sudah tidak berhak lagi menerima bantuan BPNT. Dan memang pada saat turun riset, penerima program BPNT ini tidak diperbarui kembali penerimanya masih memakai data yang lama. Efektivitas dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Ponorogo dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur keefektifan program tersebut dengan ketepatan sasaran.

## **REFERENSI**

- Baihaqi. 2022. "Analisis Efektivitas Peran Pemerintah Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan (Kajian Di Kabupaten Pidie Jaya)." *Journal of Islamic Law* 04(01):2.
- Budiani, Ni Wayan. 2017. "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna 'Eka Bhakti' Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar." *Ekonomi Dan Sosial INPUT* 2(1):34.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Imron, Masyuri. 2003. "Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 5(1):70.
- Irwan Noor, Isnaini Kholif, Khodizah. n.d. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*. Vol. 2.
- Ishak, Fadlurrohim, Soni Akhmad Nulhaqim, Sri Sulastri. 2019. "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi)." *Social Work Journal* 9(2):124.
- Lincolin, Arsyad. 2020. *Ekonomi Pembangunan*. Unit Pener. Yogyakarta.
- Mujahiddin, Ananda Mahardika. 2017. *Perempuan Dan Kemiskinan*. Medan: UMSU-PRESS.
- Rachman Benny, Adang Agustina, Wahyudi. 2018. "Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)." *Analisis Kebijakan Pertanian* 16(1):2.
- Rizki Rigeras Aldzuhri D. 2021. "Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasa Kemiskinan Di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2019." Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.
- Sembako, Pedoman Umum Program. 2020. *Pedoman Umum Program Sembako 2020*. Jakarta. Kementerian Sosial.
- Soewarno. 2016. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Solihin, Dadang. 2021. *Administrasi Pembangunan*. Surabaya: Jakad Media.
- Sopha, Julia. 2010. *Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah*. Jakarta: Universitas

**Putri Rahayu, Hanik Fitriani**

Indonesia.

Statistik, Badan Pusat Kabupaten Ponorogo. 2021. "Garis Kemiskinan, Jumlah, Dan Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Ponorogo 2019-2021." *BPS PONOROGO*. Retrieved December 16, 2022 (<https://ponorogokab.bps.go.id/indicator/23/61/1/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-kabupaten-ponorogo.html>).

Yuliana, Monika. 2020. "Efektivitas Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga Penerima Manfaat Di Ponorogo." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo